

PENGARUH PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI DAN KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Audry Leiwakabessy  
Politeknik Negeri Ambon  
Email: [audryleiwakabessy@gmail.com](mailto:audryleiwakabessy@gmail.com)

ABSTRAK

Pengaruh pengendalian intern akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengendalian intern akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan manajer hotel di Kota Ambon dan sampel adalah pimpinan dan manajer hotel bintang III, bintang II, bintang I. Penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan (0.705) dengan nilai probabilitas 0.04 dan derajat signifikan yang digunakan adalah 0.05. Sedangkan anggaran akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan nilai probabilitas 0.20 dan derajat signifikan yang digunakan adalah 0.05.

**Kata Kunci :** Pengaruh Akuntansi, Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajibannya memberikan pertanggungjawaban publik adalah menyediakan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingannya (stakeholder). Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban. keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas publik telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di berbagai negara, bukan hanya di negara berkembang saja namun negara yang sudah maju sekalipun berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publik (Mahmudi, 2002). Permasalahan akuntabilitas publik sangat kuat disuarakan sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Mahmudi, 2002). Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas

hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (stakeholder). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan mengandung informasi bagi pemakai yang berbeda-beda, seperti anggota legislatif, kreditor, karyawan dan masyarakat umum. Para pemakai laporan keuangan tersebut membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan, untuk membuat penilaian, keputusan keuangan dan keperluan lainnya.

Permasalahan akuntabilitas publik muncul apabila pemerintah daerah tidak mampu menyajikan informasi mengenai kinerja pemerintah secara relevan, handal, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat sebagai konstituennya. Di sisi lain, permasalahan juga bias muncul apabila masyarakat tidak memahami laporan kinerja yang disajikan oleh pemerintah. Terhadap kemungkinan ini, pihak penyaji laporan keuangan tidak bisa dengan serta merta menyalahkan masyarakat tidak mampu memahami laporan keuangan pemerintah, karena pada umumnya public membutuhkan informasi yang sederhana dan langsung menyangkut kepentingan mereka. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Pengendalian Intern Akuntansi

Definisi pengendalian intern menurut Mulyadi (2008) adalah :“suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan antara lain: keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta efektifitas dan efisiensi operasi.”

Menurut Mahmudi (2010) pengertian sistem pengendalian intern adalah : “proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metoda, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan pimpinan. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari pengendalian intern yang berkaitan dengan tujuan pertama dan kedua sedangkan pengendalian intern administratif berkaitan dengan tujuan ketiga dan keempat.

### 2.2. Tujuan Pengendalian Intern

Adapun tujuan dibangunnya system pengendalian intern adalah

1. Untuk melindungi asset (termasuk data) Negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal

4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP).

- 5.

6. Untuk Efisiensi dan Efektivitas Operasi

7. Untuk Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

### 2.3. Unsur Pokok Pengendalian Intern

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan fungsi
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

Banyak penulis yang mengemukakan komponen atau unsur-unsur pokok yang termasuk dalam pengendalian intern akuntansi. Wilkinson *et al.*, (2000) menyebutkan sub komponen dari aktivitas pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan adalah (1) perancangan yang memadai dan penggunaan dokumen-dokumen dan catatan-catatan bernomor; (2) pemisahan tugas; (3) otorisasi yang memadai atas transaksi-transaksi; (4) pemeriksaan independen atas kinerja; dan (5) penilaian yang sesuai/tepat atas jumlah yang dicatat.

### 2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

### 2.5. Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan pemerintah daerah pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitupara pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisikeuangan pemerintah (Indriasari dan

Ertambang, 2007). Dengan diberlakukannya paket Undang-Undang bidang keuangan negara (UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Sejak saat itulah, keseluruhan proses pelaporan keuangan pemerintah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah di dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dalam suatu periode sebagai gambaran dari kinerja entitas yang bersangkutan. Laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif dapat menjadi fasilitas dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Laporan keuangan pemerintah daerah setidaknya terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan laporan surplus/defisit. Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern, laporan keuangan digunakan untuk penilaian kinerja, (Mardiasmo, 2004).

### 2.6. Entitas Pelaporan

Salamun (2007) menyatakan bahwa unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan disebut sebagai Entitas Akuntansi. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan Entitas Pelaporan. Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan disebut sebagai Entitas Pelaporan. Jadi, laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Pelaporan merupakan gabungan dari laporan keuangan beberapa Entitas Akuntansi. Disebutkan bahwa dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

Berkaitan dengan entitas pelaporan, Halim (2007) menyebutkan bahwa pada ketentuan terdahulu terdapat dua pilihan bagi pemerintah daerah dalam

menentukan entitas pelaporan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, saat ini pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem desentralisasi dalam pelaporan keuangannya, sehingga baik satuan kerja maupun bagian keuangan pemerintah daerah melaksanakan akuntansi. Satuan kerja melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi (dan menghasilkan laporan keuangan) yang terjadi pada bagiannya, dan bagian keuangan akan menggabungkan atau mengkonsolidasikan laporan keuangan semua satuan kerja (termasuk bagian keuangan itu sendiri) untuk disusun menjadi laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

### 2.7. Peran dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Salamun (2007) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi (pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan) dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kelompok pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: lembaga pemerintah, investor dan kreditor, penyedia sumber daya, badan pengawas, dan konstituen (Mardiasmo, 2007). Pengelompokan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Bastian (2001) yaitu: legislatif dan manajemen pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, institusi internasional, pengamat, dan aparat pemerintah.

Untuk menyederhanakan dan menyamakan persepsi tentang kelompok pengguna laporan keuangan ini, kita gunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan, yang menyebutkan kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas, yaitu: masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman serta pemerintah.

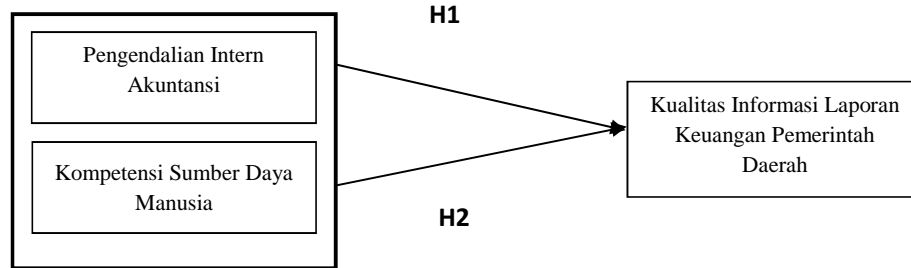
### 2.8. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, (SAP, 2010). Menurut Mahmudi (2010) laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat Dibandingkan
4. Dapat Dipahami

**2.9. Kerangka Pikir Penelitian**

Berdasarkan pada telaah literatur dan beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



**Gambar 2.1.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**

**2.10. Hipotesis**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dibangun hipotesis sebagai berikut :

- H<sub>1</sub>: Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
- H<sub>2</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Populasi, Sampel dan Unit Analisa**

- a. Populasi : bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kota Ambon dan Seram Bagian Barat
- b. Sampel :Penyampelan atas responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah yaitu kepala dan staf subbagian akuntansi/penatausahaan keuangan
- c. Unit Analisa : Pengendalian intern akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia pada sub bagian akuntansi/penatausahaan keuangan

**3.2. Metode Analisis**

**3.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui kevalidan butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Alat uji yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi tersebut adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Masing-masing instrumen harus memiliki nilai KMO

MSA (*Measure of sampling adequacy*) lebih dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dapat dikatakan tepat untuk analisis faktor (Hair *et al.*, 2006).

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978).

**3.2.2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi data penelitian (Hair *et al.*, 2006; Gujarati, 2003).

**3.2.3. Pengujian Hipotesis**

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$KIL = a + b_1PIA + b_2KSDM + e \dots\dots\dots(3.1)$$

Keterangan:

- KIL : Kualitas Informasi Laporan Keuangan
- a : Konstanta
- b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub> : Koefisien regresi
- PIA : Pengendalian Intern Akuntansi
- KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia
- e : *error*

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Variabel kualitas informasi laporan keuangan diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3, dari 94 responden dihasilkan rentang aktual 20-35 artinya tingkat kualitas informasi laporan keuangan yang kurang andal berada pada kisaran 20 dan tingkat kualitas informasi laporan keuangan yang andal berada pada kisaran 35. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7 (menunjukkan kualitas informasi yang tidak andal) sampai 35

(menunjukkan perilaku kualitas informasi yang sangat andal). Rata-rata aktual (mean) tingkat kualitas informasi laporan keuangan untuk seluruh responden adalah 27,27 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 21. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi laporan keuangan memiliki kecenderungan bersifat andal. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel kualitas informasi laporan keuangan adalah sebesar 3,449. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada mean.

## 4.2. Pengendalian Intern Akuntansi

Variabel pengendalian intern akuntansi diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 9 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3, dari 94 responden dihasilkan rentang aktual 24-45, artinya tingkat pengendalian intern akuntansi yang kurang memadai berada pada kisaran 24 dan tingkat pengendalian intern akuntansi yang lebih memadai berada pada kisaran 45. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 9 (menunjukkan pengendalian intern akuntansi yang paling tidak memadai) sampai 45 (menunjukkan pengendalian intern akuntansi yang paling memadai). Rata-rata aktual (mean) pengendalian intern akuntansi untuk seluruh responden adalah 35,21 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 27. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi memiliki kecenderungan lebih memadai. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi untuk variabel pengendalian intern akuntansi adalah sebesar 4,697. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada mean.

## 4.3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 7 pertanyaan. Seperti terlihat pada tabel 4.3, dari 94 responden dihasilkan rentang aktual 21-34, artinya tingkat kompetensi sumber daya manusia yang kurang berada pada kisaran 21 dan tingkat kompetensi sumber daya manusia yang tinggi berada pada kisaran 34. Sedangkan rentang yang mungkin terjadi adalah antara 7 (menunjukkan tingkat kompetensi sumber daya manusia yang rendah) sampai 35 (menunjukkan tingkat kompetensi sumber daya manusia yang tinggi). Rata-rata aktual (mean) tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk seluruh responden adalah 26,71 sedangkan rata-rata teoritisnya adalah 21. Karena rata-rata aktual lebih tinggi daripada rata-rata teoritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki kecenderungan lebih kompeten. Standar deviasi menunjukkan ukuran variasi data terhadap mean (jarak rata-rata data terhadap mean). Standar deviasi

untuk variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 3,081. Hal ini berarti bahwa variansi data relatif kecil karena standar deviasi lebih kecil daripada mean.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi berganda (*multiple regression*) disimpulkan bahwa:

1. Dilihat dari nilai  $t_{test}$  dan probabilitasnya, hipotesis  $H_1$  yang diajukan diterimadengan  $t_{test}$  0.159 dan probabilitas  $0.001 < 0.05$ . Hasil pengujian hipotesis  $H_1$  menunjukkan bahwa Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan. Jika penerapan pengendalian intern berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang handal begitu juga sebaliknya.
2. Dilihat dari nilai  $t_{test}$  dan probabilitasnya, hipotesis  $H_2$  yang diajukan diterimadengan  $t_{test}$  0.812 dan probabilitas  $0.00 < 0.05$ . Hasil pengujian hipotesis  $H_2$  menunjukkan bahwa bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup dan *skill yang* memadai akan bekerja efektif dan efisien sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas yaitu andal dan tepat waktu.

### 5.2. Saran

1. Penelitian ini dilakukan hanya di dua wilayah Propinsi Maluku, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir ke semua objek. Dengan kata lain validitas eksternal dari hasil penelitian ini masih rendah. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperluas objek penelitian.
2. Perlunya pendampingan untuk memberikan pemahaman kepada responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner serta sikap kepedulian dan keseriusan dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada karena masalah subjektivitas dari responden dapat mengakibatkan hasil penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban responden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Chenhall, RH. & Morris, D. 1986. *The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on Perceived Usefulness of Management Accounting Systems*. The Accounting Review, Vol.61, pp.16-35
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPF, Yogyakarta
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Gujarati, Damodar N. 2003. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, Inc. New York.
- Hair, J.F., Black, William C. Babin, Barry J. Anderson, Rolph E. Tatham, & Ronald L. 2006. *Multivariate Data Analysis*. Sixth Edition. Upper Saddle River, Prentice Hall International, Inc.
- Henley, D., A. Likierman, J. Perrin, M. Evans, I. Lapsley, & J. Whiteoak. 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control*. Fourth Edition. Chapman & Hall.
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. www.osc.state.ny.us.
- Imelda. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. 1996. *Public Sector Accounting*. Fifth Edition. London: Pitman
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. *Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Nunnally, J.C. 1978. *Psychometric Theory*. New York, Mc Graw-Hill.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Sugijanto. 2002. *Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999*. Lintasan Ekonomi. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPF, Yogyakarta.
- Tim GTZ-USAID/CLEAN Urban. Januari 2001. *Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintahan Daerah-Suatu Kerangka Kerja bagi Pemerintah dan Dukungan Donor*. Laporan Akhir: Studi Pengkajian Kebutuhan Pengembangan Kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. www.gtzsfdm.or.id.
- Tim GTZ-Support for Decentralization Measures/P4D. Mei, 2005. *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jilid II: Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kelembagaan Pemerintah.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

World Bank. Maret, 2007. *Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh: Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah di Aceh.*

